



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU**

JALAN GARUDA NO. 22 PALU 94116
TELEPON (0451) 482131, FAKSIMILE (0451) 482131
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.palu@kkp.go.id

Yth. Plt Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.39.1/SPPMHKP.PALU/TU.140/I/2026

No.	Jenis Sampel yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025, Stasiun KIPM Palu	Satu Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
.....,

Palu, 22 Januari 2025
Pegirim
Kepala Stasiun KIPM
Palu,



(.....)

Hamzah



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TA. 2025

BADAN PENGENDALIA DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKIPM PALU

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu (LKj SKIPM Palu) tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM PALU dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

LKj Tahun 2025 Stasiun KIPM Palu diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Tahunan Tahun 2025 Stasiun KIPM Palu adalah Target kinerja dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Tahun 2025.

Kami berharap laporan kinerja Tahunan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Palu dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Palu, 20 Januari 2026

Kepala



HAMZAH, S.PI.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 ARAH KEBIJAKAN	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS	7
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	8
2.3 ANGGARAN	10
2.4 PENGUKURAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 CAPAIAN KINERJA	12
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	14
3.3 REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	36

Tabel 1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM PALU Tahun 2025	9
Tabel 2	Alokasi Pagu Stasiun KIPM Palu	10
Tabel 3	Capaian Kinerja SKIPM PALU Triwulan I Tahun 2025	13
Tabel 4	Target dan Realisasi IK.1.01 Pada Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 5	Target dan Realisasi IK.1.02 Pada Triwulan I Tahun 2025	17
Tabel 6	Target dan Realisasi IK.1.03 Pada Triwulan I Tahun 2025	19
Tabel 7	Target dan Realisasi IK.1.04 Pada Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 8	Target dan Realisasi IK.2.01 Pada Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 9	Target dan Realisasi IK.3.01 Pada Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 10	Target dan Realisasi IK.3.02 Pada Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 11	Target dan Realisasi IK.3.03 Pada Triwulan I Tahun 2025	26
Tabel 12	Target dan Realisasi IK.3.04 Pada Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 13	Target dan Realisasi IK.3.05 Pada Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 14	Target dan Realisasi IK 3.06 Pada Triwulan I Tahun 2025	32
Tabel 15	Target dan Realisasi IK 3.07 Pada Triwulan I Tahun 2025	32
Tabel 16	Target dan Realisasi IK 3.08 Pada Triwulan I Tahun 2025	33
Tabel 17	Target dan Realisasi IK.3.09 Pada Triwulan I Tahun 2025	34
Tabel 18	Penyerapan Anggaran per kegiatan Triwulan I Tahun 2025	35
Tabel 19	Penyerapan Anggaran per kegiatan Triwulan I Tahun 2025	35

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM PALU	3
Gambar 2.	Peta Strategis, Sasaran dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palu Tahun 2025	8
Gambar 3.	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaku	12

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Palu pada Tahunan Tahun 2025 adalah Sebesar **113,17 %**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Palu yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Tahun 2025. capaiannya adalah 100 (persen) dengan target Tahunan yaitu 70 (Persen).
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 100 (persen) dengan target Tahunan yaitu 70 (Persen).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah (100) persen dengan target Tahunan yaitu 99 (Persen).
4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 83,72 (Nilai) dengan target Tahunan yaitu 75 (Nilai).
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 89,44 (Nilai) dengan target Tahunan yaitu 75 (Nilai).
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya dengan nilai 96,66 (Nilai) dari target Tahunan yaitu 92 (Nilai).
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 100 (Nilai) dengan target Tahunan yaitu 71.5 (Nilai)
8. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 100 (Persen) dengan target Tahunan yaitu 100 (Persen).
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 86.11 (Indeks) dengan target Tahunan yaitu 82 (Indeks).
10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 87.9 (Indeks) dengan target Tahunan yaitu 86 (Indeks).

11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Palu capaiannya adalah 100 (Persen) dengan target Tahunan adalah 85 (persen).
12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 100 (Persen) dengan target Tahunan adalah 76 (persen).
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 71,08 (Persen) dengan target Tahunan adalah 70 (Persen).
14. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu capaiannya adalah 4,00 dengan target Tahunan adalah 3.36 (Indeks).

Kinerja keuangan SKIPM Palu Tahunan tahun 2025 mencapai **Rp. 5.341.271.843.** atau **94,05%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 5.679.097.000.** terdapat blokir anggaran sebesar **Rp.212.100.000** sehingga total realisasi **97,70%** Pagu anggaran Stasiun KIPM Palu tersebut dilaksanakan melalui program Nilai tambah dan daya saing industri dan program dukungan manajemen, kegiatan meliputi: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggara *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan susunan organisasi dan perubahan nomenklatur dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas memberikan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawahnya Stasiun KIPM Palu dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Palu. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Palu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palu Tahunan Tahun 2025 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat di capai melalui implementasi program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran strategis tersebut yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2030).

Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT 2025 dan RKA-KL 2025 serta yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sehingga diketahui sejauh mana Tingkat capaian kinerja Stasiun KIPM Palu selama 2025.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

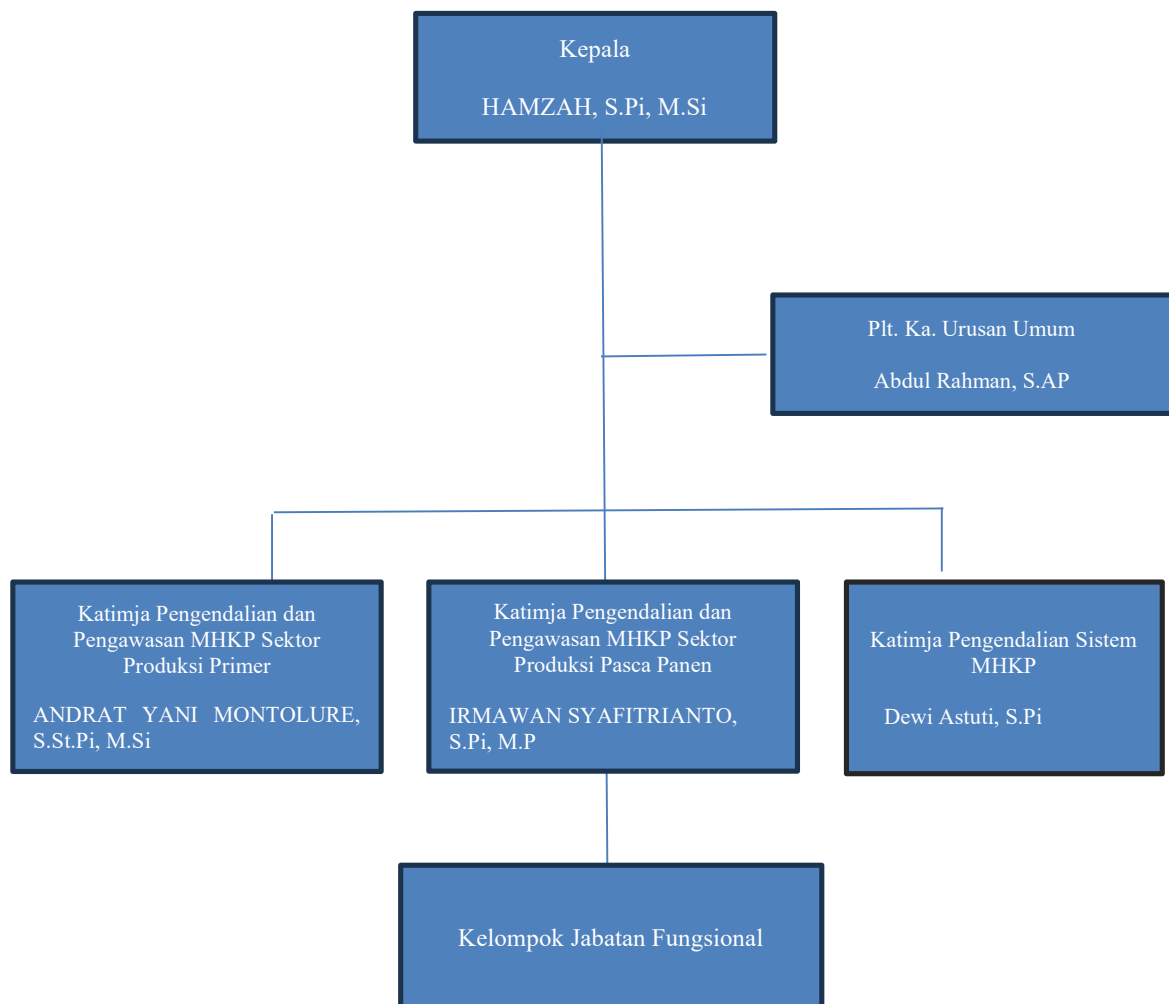
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKIPM Palu dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan unsur pelaksana Badan Pengendalian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah dengan dibantu oleh 1 (satu) eselon V yaitu Plt Ka.Urusan Umum, 3 (Tiga) Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1) sebagai berikut:

1. Kepala
2. Plt. Kepala Urusan Umum
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen
5. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM PALU

Adapun tugas dan fungsi jajaran dibawah kepala kantor adalah sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas melaksanakan urusan Urusan Tata Usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas melakukan pengujian terhadap mutu, kualitas dan keamanan hasil perikanan.
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian, dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan di unit pembudidaya ikan, unit pembenihan, supplier dan unit pengolahan ikan dan melaksanakan monitoring kesegaran ikan di wilayah perairan/wilayah penangkapan ikan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional .

Jumlah SDM yang mendukung kinerja SKIPM Palu selama Tahun 2025 berjumlah 13 orang pegawai dan P3K dengan komposisi pejabat struktural sebanyak 1 orang, fungsional Mutu sebanyak 1 orang, Fungsional APK APBN 2 Orang dan fungsional Umum sebanyak 5 orang serta dibantu oleh P3K sebanyak 4 orang, dan pegawai PJLP sebanyak 6 orang.

1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Palu disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Palu adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini menyampaikan Tingkat pencapaian kinerja Stasiun KIPM Palu Tahun 2025. Tingkat keberhasilan capaian kinerja tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahunan Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Tahunan tahun 2025.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 Stasiun KIPM Palu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis.
- BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja strategis.
- BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2030

Perencanaan Strategis merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumberdaya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolak ukur penting dari system kinerja instansi pemerintah.

Stasiun KIPM Palu telah menyusun perencanaan strategisnya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palu tahun 2025-2030 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan kinerja tahun 2025.

Selaras dengan Pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT SKIPM Palu memiliki fungsi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi dibidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi dibidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BPPMHKP sebagai berikut :

Visi : “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan Masyarakat kelautan dan perikanan yang Sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi : 1) Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2) Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan. 3) Mewujudkan system jaminan mutu

dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar nasional.

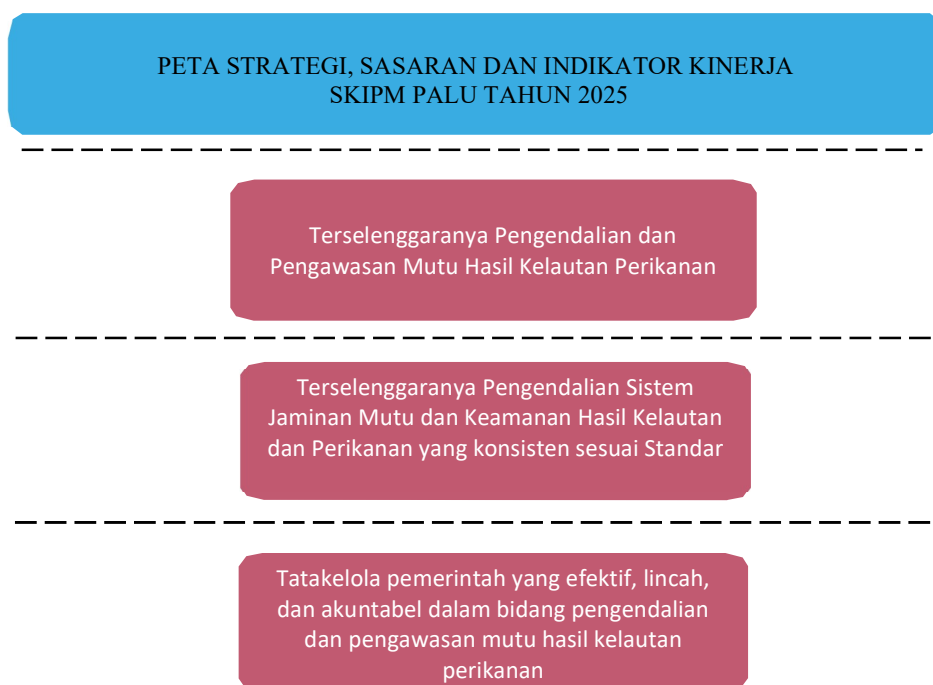
4) Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Adapun Tujuan Strategi untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah “Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan”

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Palu Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 dibawah ini



Gambar. 2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Palu Tahun 2025

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Palu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2025	Tahunan
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	70	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	99	99
Kegiatan 2. Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar					
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.	4	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	75	75
		5	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	75	75
Kegiatan 3. Dukungan Manajerial Internal Lingkup BPPMHKP					
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	92	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	71,5	71,5
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Persen)	100	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Indeks)	82	82
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	86	86
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Persen)	85	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Persen)	76	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Persen)	70	70
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	3.36	3.36

2.3 ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Palu Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 032. 13 .2. 649601/2025 pagu awal sebesar Rp. 7.435.052.000 dan pagu akhir sebesar Rp. 5.679.097.000, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal sebanyak 7 kali yang disebabkan adanya Penghematan belanja pemerintah berupa Revisi Blokir dan Revisi Buka Blokir, Revisi Penyesuaian POK/penyesuaian halaman III DIPA dan revisi anggaran belanja pegawai, Adapun Anggaran Blokir sebesar Rp. 212.100.000 yang bersumber dari PNBPN, alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Palu TA 2025

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	7,056,052,000	5.356.217,000
2	Manajemen Mutu	159,000,000	192.500,000
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	220,000,000	322.880,000
TOTAL		7,435,052,000	5.679.097.000

2.4. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah Realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

$$100 \leq X \leq 120$$

(memenuhi ekspektasi)

$$80 \leq X \leq 100$$

(belum memenuhi ekspektasi)

$$X \leq 100$$

(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

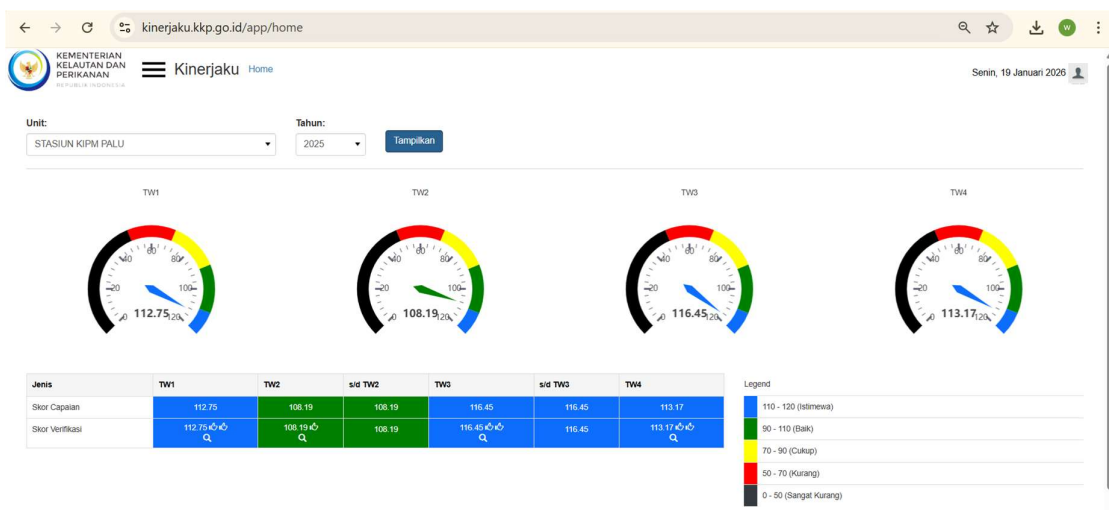
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu (SKIPM Palu) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Palu. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Palu, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Palu pada Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 113,17% . Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Palu pada Tahun 2025 ini capaiannya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Palu pada Tahunan Tahun 2025 seperti pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Capaian IKU dan IKK SKIPM Palu Tahunan tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Palu pada Tahunan Tahun 2025 dapat Dilihat Pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Capaian Kinerja SKIPM PALU Tahunan Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Capaian	
				Target 2025	Capaian 2025
Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	70	100
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	99	100
Kegiatan 2. Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar					
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	75	83,72
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	75	98,44
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen internal lingkup BPPMHKP					
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	92	96,66
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	71.50	100
		8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Persen)	100	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Indeks)	82	86.11
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	86	87.90
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	85	100
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	76	100
		13.	Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)	70	71,08
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)	3.36	4.00

3.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Sasaran Strategis ***Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan*** menjadi tolok ukur dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan Stasiun KIPM Palu. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen)
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan di terima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (persen).

IK.1.01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produksi hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Pada Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Infeksi ke Lokasi usaha

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah indicator ini merupakan indicator baru yang sebelumnya tidak ada, indicator ini muncul karena ada perubahan SOTK di pusat dan indicator ini merupakan pelimpahan dari eselon I lain sebelumnya, sehingga dengan waktu yang mepet menjadikan kegiatan ini kurang optimal.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 120% dari target yaitu 70%

Realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1.01. pada Tahun 2025

SPI	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	100%	70%	70%	100%	120%	120%	70%	120%

Ket Realisasi Tahun 2020 s.d 2024 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2023: tidak ada IKU)

IK.1.02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu

dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 120%. Sehingga apabila dilakukan perhitungannya sebagai berikut :

$$\%X = A + B \times 100\%$$

Xn

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{A + B}{x_n} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{200}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100 \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian kinerjanya sama yaitu 100%

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan melakukan Bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan, serta validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 120% ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 1 orang fungsional Inspektur mutu dan 2 orang asisten inspektur mutu atau sebesar 527.27 % dari total pegawai ASN SKIPM Palu sebanyak 9 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi Teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 120% dari target yaitu 70%

Realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK.1.02. pada Tahun 2025

SPI LK.2	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu											
	Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
	-	-	-	-	100%	70%	70%	100%	120%	120%	70%	120%

Ket Realisasi Tahun 2020 s.d 2024 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2023: tidak ada IKU)

IK.1.03. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu (persen)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang di ekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh Negara tujuan ekspor (HC yang di tolak oleh negara tujuan ekspor).

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditarget sebesar 99% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 101,01%, tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 25 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

Adapun pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

A

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (HC Mutu)

B = Jumlah HC (Mutu) yang ditolak oleh negara tujuan

Ket :

*) = Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC karantina dan mutu dilampirkan

$$X = \frac{25 - 0}{25}$$

25

$$X = \frac{6}{6}$$

6

$$X = 1 \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 101% dari target yaitu 99%

Realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.1.03. pada Tahun 2025

SPI	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu (persen)										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	100%	100%	99%	99%	100%	101%	101%	99%	101%

Ket Realisasi Tahun 2020 s.d 2024 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2022: tidak ada IKU)

Sasaran Program 2.

Sasaran Strategis *Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar* menjadi tolok ukur dari Pusat Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar dan Stasiun KIPM Palu. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja :

- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)

- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)

IK.2.01 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (nilai)

Aspek keamanan produk perikanan adalah bagian dari keseluruhan mutu produk perikanan yang bersifat wajib. Masalah keracunan dan kontaminasi pada produk perikanan menjadi perhatian konsumen di seluruh dunia, sehingga masalah mutu dan keamanan produk perikanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi.

Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan oleh otoritas kompeten, Kepala Badan selaku koordinator manajer puncak menetapkan :

- a. laboratorium acuan;
- b. laboratorium penguji; dan
- c. lembaga inspeksi.

Laboratorium penguji merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan parameter uji yang diperlukan dan telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional.

Untuk mendukung keberhasilan system jaminan mutu yang akan diselenggarakan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu memberikan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dengan rangkaian kegiatan didalamnya antara lain : Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025), Perawatan Sistem, Uji Profisiensi/ Uji Banding.

Target Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji di tahun 2025 adalah 1.0 Rekomendasi Kebijakan.

Penerima Manfaat

1. Masyarakat pengguna jasa
2. UPI
3. Petugas teknis UPT KIPM
4. Konsumen
5. Stakeholder lainnya

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025)

Untuk menilai kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 maka KAN akan melakukan asesmen, yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kecukupan (pemeriksaan dokumen mutu terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi) dan asesmen lapangan untuk melihat efektivitas implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian BPPMHKP PALU.

- Perawatan Sistem

Untuk mendukung penambahan ruang lingkup parameter uji maka perlu dilakukan perawatan sistem salah satunya dengan melakukan kalibrasi alat yang digunakan oleh laboratorium dalam melakukan pengujian. Kalibrasi alat dilakukan dengan onsite yaitu mendatangkan petugas kalibrator dari Lembaga Kalibrasi yang sudah terakreditasi dan onsite yaitu membawa beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi langsung di Laboratorium Uji BPPMHKP PALU.

- Uji Profisiensi/Uji Banding

Sebagai jaminan mutu dalam melakukan pengujian, BPPMHKP PALU mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BUSKIPM dan uji banding dengan mengirimkan sampel ke laboratorium lain. Keikutsertaan dalam uji banding dan uji profisiensi adalah sebagai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan system manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 83,72 atau ,mencapai 111,63% dari target yaitu 75

Realisasi Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK.2.01 pada Tahun 2025

SP2	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (nilai)										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	85,12	75	75	83,72	111,63%	111,63%	75	111,63%

Ket Realisasi Tahun 2020 s.d 2024 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2023: tidak ada IKU)

IK.2.02 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (nilai)

Aspek keamanan produk perikanan adalah bagian dari keseluruhan mutu produk perikanan yang bersifat wajib. Masalah keracunan dan kontaminasi pada produk perikanan menjadi perhatian konsumen di seluruh dunia, sehingga masalah mutu dan keamanan produk perikanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi.

Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan oleh otoritas kompeten, Kepala Badan selaku koordinator manajer puncak menetapkan :

- a. laboratorium acuan;
- b. laboratorium penguji; dan
- c. lembaga inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan kegiatan inspeksi. Lembaga inspeksi dapat merupakan sebuah organisasi, atau bagian dari sebuah organisasi.

Untuk mendukung keberhasilan sistem jaminan mutu yang akan diselenggarakan, BPPMHKP Palu memberikan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Inspeksi dengan rangkaian kegiatan Sertifikasi sistem manajemen mutu

Target Penerapan Inspeksi di tahun 2025 adalah 1.0 Unit Kerja.

Penerima Manfaat

6. Masyarakat pengguna jasa
7. UPI
8. Petugas teknis UPT KIPM
9. Konsumen
10. Stakeholder lainnya

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penerapan Standar Metode Pengujian

Untuk menilai kompetensi Inspektur Mutu yang ada di BPPMHKP Palu berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012 maka KAN akan melakukan penilaian atas nama klien, organisasi induknya, atau dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standar, spesifikasi, skema inspeksi atau kontrak. Parameter inspeksi mencakup kuantitas, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian keselamatan pengoperasian instalasi atau sistem secara terus menerus. Melalui proses asesment dari KAN dapat memastikan jasa inspeksi dari lembaga inspeksi yang ada di BPPMHKP Palu dapat diterima oleh klien dan otoritas pengawas jasa inspeksi.

Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan system manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 89,44 atau ,mencapai 119,25% dari target yaitu 75

Realisasi Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK.2.02 pada Tahun 2025

SP2	Terselenggarannya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (nilai)										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw.1V 2025	Realisasi Tw.1V 2025	% Realisasi terhadap target Tw.1V 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	--	-	-	75	75	89,44	119,25%	119,25%	75	119,25%

Ket Realisasi Tahun 2020 s.d 2024 Yaitu: (tahun 2020 s.d 2024: tidak ada IKU)

Sasaran Program 3.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Learn And Growth PerspektiIe

Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palu pada Learn and Growth PerspektiIe berasal dari sasaran strategis ***Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan*** dengan terwujudnya aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berintegritas, tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses, terwujudnya kelembagaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, serta terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
3. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
8. Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu
9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

IK.3.01. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 96,66 atau ,mencapai 105,07% dari target yaitu 92.

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK.3.01 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggarannya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	99,34	97,68	92	92	96,66	105,07%	105,07%	92	105,07%

IK.3.02. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam perencanaan Anggaran berdasarkan

Aplikasi Monev Kemenkeu. Belum terdapat realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA).

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 120% dari target yaitu 75,1

Realisasi Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 3.02 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggarannya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	86,04	75	71.5	71.5	100%	120%	120%	71.5	120%

IK.3.03 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 100% dari target yaitu 100%

Realisasi Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK.3.03 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.3	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IK.3.04 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi
- Kompetensi
- Kinerja
- Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D II/SM	10
1	Pendidikan D I/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut :

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- Kualifikasi**, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi**, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

☐ Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

• **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;

- Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Bagi Pegawai Negeri Sipil** yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;

d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator ini adalah : menginput sertifikat diklat semua pegawai yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 sehingga nilai kompetensi bisa meningkat, menginput SKP Tahun 2025 dengan baik pada aplikasi SKP KKP, disiplin dalam bekerja sehingga meminimalisir terkena hukuman disiplin

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 86,11 atau ,mencapai 105,01% dari target yaitu 82

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK.3.02 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	78,73	88.50	82	82	86,11	105,01%	105,01%	82	105,01%

IK.3.05. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah Nilai yang menggambarkan kemampuan Aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih professional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Istansi Pemerintah.

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Palu dengan meratakan nilai dari seluruh komponen kinerja.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 87,90 atau ,mencapai 102,21% dari target yaitu 86

Realisasi penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK.3.05 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	--	-	83,10	86	86	87,90	102,21%	102,21%	86	102,21%

IK.3.06. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat

dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Palu pada Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2025, indikator ini memiliki capaian yang sama pada Tahun 2025 tercapai 100, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 telah mencapai 117,65 % dari target 85%.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palu didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

Keterangan:

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Palu

$\sum N$: Jumlah rekomen dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM Palu

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 117,65% dari target yaitu 85%

Realisasi Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK.3.06 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	100%	117.65%	117.65%	85%	117.65%

IK.3.07. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Palu

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Palu dengan merata-ratakan nilai dari seluruh unsur yaitu : (1) Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke Aplikasi SIRUP, (2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE, (3) Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Palu.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% atau ,mencapai 120% dari target yaitu 76%

Realisasi Presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada sirup lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK.3.07 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	78.26	91,98%	76%	76%	100%	120%	120%	76%	120%

IK.3.08. Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi : (1) Pembangunan zona integritas, (2) Program pengendalian gratifikasi, (3) Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS, (4) Penanganan benturan kepentingan, (5) Pelaporan Harta

Kekayaan (LHKAN), (5) Pengendalian Kecurangan. Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Persentase pemenuhan dokumen.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 71.08 atau ,mencapai 101,54% dari target yaitu 70%

Realisasi Presentase pemenuhan dokumen Pembangunan ZI Lingkup Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 3.08 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan											
LK.8	Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu											
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra	
-	-	--	-	-	70%	70%	71,08	101,54%	101,54%	70%	101,54%	

IK.3.09 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BPPMHKP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SurveiKepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai S KM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang Total}$$

$$\text{IKM} = 33.95 \times \frac{1}{9}$$

$$\text{IKM} = 3.77$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = \text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = 3.77 \times 25$$

$$\text{SKM} = 94.44$$

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palu merupakan indikator utama Stasiun KIPM Palu dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan UPT Stasiun KIPM Palu.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 4,00 atau ,encapai 119,05% dari target yaitu 3,36.

Realisasi Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palu seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK.3.09 pada Tahun 2025

SP3	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan										
LK.8	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu										
Realisasi tahun 2020 s.d 2024					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tahunan 2025	Realisasi Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target Tahunan 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Cpaian terhadap target Renstra
-	-	-	95.15	3.57	3.36	3.36	4,00	119,05%	119,05%	3.36	119,05%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Palu pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 07 tanggal 18 November 2025 Nomor : SP DIPA-032.13.2.649601/2025 sebesar Rp. 5.679.097.000, Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.438.697.000 dan PNPB sebesar Rp.240.400.000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Palu pada Tahun 2025 mencapai Rp. 5.341.271.843 atau sebesar 94,05 %. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp.212.100.000 atau 3,73%, Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Palu T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 18. dan Tabel 19 berikut ini :

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TA 2025	%
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	5.356.217,000	5.168.482.393	96,50%
2	Manajemen Mutu	192,500,000	169.209.450	87,90%
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu	322.880,000	172.789.450	53,51%
TOTAL		5.679.097.000	5.341.271.843	94,05%

Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TA.2025	%
1	Belanja Pegawai	3.257.154.000	3.135.999.333	96,28 %
2	Belanja Barang	2.421.943.000	2.205.272.501	91,05 %
3	Belanja Modal	0	0	
TOTAL		5.679.097.000	5.341.271.834	94,05 %

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palu Tahun 2025 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategi tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Tingkat capaian kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Palu secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan yang telah ditetapkan selain dari beberapa kegiatan yang memang target capainnya periode semester atau akhir tahun periode.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 14 indikator kinerja utama, Stasiun KIPM Palu tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU menyesuaikan perubahan Indikator Kinerja yang baru.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, Laporan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palu Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintah yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (performance plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) Rencana Strategis (Strategi Plan) di lingkungan Stasiun KIPM Palu di masa mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (%)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
%Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima diunit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan

dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- BPPMHKP Palu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Palu terdiri dari:
 - a. Sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada unit pengolahan ikan;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan;
 - c. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) pada kapal perikanan;
 - d. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit pembenihan;
 - e. Sertifikat Cara BudiDaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada unit budidaya.
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi baru atau perpanjangan Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan / UMKM dalam rangka sertifikasi SKP, Surveilans penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada unit pengolahan ikan lingkup Stasiun KIPM Palu
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi unit pembenihan dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun KIPM Palu.

- Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun KIPM Palu menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi produksi primer Lingkup UPT SKIPM Palu Tahun 2025

Tahun	REALISASI			TARGET	PERSENTASE CAPAIAN
	CBIB	CPIB	CPIB KAPAL		
2025	2	0	1	70%	100

Sampai dengan Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi produksi primer yakni pelaksanaan Inspeksi CBIB, indentifikasi CPIB Kapal, Identifikasi CPIB Benih. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan adanya kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh unit pembudidaya. Berdasarkan hasil kegiatan pada 2 unit pembudidaya ikan dinyatakan memenuhi syarat dan diterbitkan Sertifikat CBIB sebanyak 2 jenis budidaya ikan. Dengan demikian pelaksanaan pada Tahun ini mencapai 100% dari target 70% sehingga secara persentase tercapai atau sama dengan nilai kinerja maksimal 120%.

Adapun bukti dukung realisasi kegiatan “penerbitan sertifikat CBIB” dapat dilihat pada link google drive berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1nEldBIFpQKUsc_Ag5rHIXVJi3xmLm71u?usp=sharing

- Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi produksi primer Lingkup UPT SKIPM Palu TAHUN 2025 berdasarkan data terkini: Telah diterbitkan 2 sertifikat CBIB atas nama Hedher Farm dengan nomor Sertifikat ID-CBIB-T-72-250406 dan terdapat pengajuan 2 sertifikasi CBIB yang sudah berproses di OSS, sedangkan CPIB Benih telah dilakukan pengajuan sertifikasi oleh Balai Benih Ikan Air Tawar Kota Palu dan telah dilakukan verifikasi dan perbaikan pusat sebanyak 1 kali. Selanjutnya akan dilakukan pengajuan sertifikasi oleh Balai Benih Ikan Air Tawar Lakatan, Tolitoli yang masih proses pemberkasan dari pelaku usaha budidaya. Data potensi CBIB telah teridentifikasi sebanyak 225 unit pembesaran ikan, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk penerapan standar keamanan pangan di sektor ini. Jadwal surveilan CBIB telah disusun dan direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2025.
- Untuk perikanan tangkap (CPIB Kapal), telah diterbitkan 1 sertifikat dan telah masuk 3 berkas permohonan. Namun hingga kini belum dilakukan inspeksi karena kendala

operasional, yaitu kapal-kapal tersebut masih melakukan aktivitas bongkar muat di wilayah Kalimantan.

- Adapun bukti dukung realisasi kegiatan “identifikasi dan verifikasi kelengkapan permohonan sertifikasi CPIB Kapal” dapat dilihat pada link google drive berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/18F7D0ygBUHbDq86S6wfwN4rQT8uWVGeS?usp=sharing>



**DOKUMENTASI KEGIATAN TW IV 2025
PELAKSANAAN SERTIFIKASI CBIB DAN CPIB KAPAL
DI STASIUN KIPM PALU**

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator :

- Selasa, 14 Oktober 2025, Telah diterbitkan sertifikat CBIB terhadap 1 unit budidaya (ikan

nila).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 280525007398100010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: HEDHER
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2805250073981
3. Alamat Kantor	: JL. LEKATU NO.105, Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94237
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
6. Lokasi Usaha	: JL. BUSILEMBA Desa/Kelurahan Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94237

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Oktober 2025

Adapun bukti dukung realisasi kegiatan “penerbitan sertifikat CBIB” dapat dilihat pada link google drive berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1nEldBIFpQKUsc_Ag5rHIXVji3xmLm71u?usp=sharing

Rekomendasi rencana aksi

untuk triwulan berikutnya

Melakukan koordinasi dengan pihak UPI, Unit budidaya, pembenihan, supplier, dan unit kapal terkait Sertifikasi sebagai bagian dari upaya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Palu, 02 Januari 2026
Kepala

Hamzah, S,Pi, M.Si



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (%)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
%Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima diunit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan

dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- BPPMHKP Palu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Palu terdiri dari:
 - a. Sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada unit pengolahan ikan;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan;
 - c. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) pada kapal perikanan;
 - d. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit pembenihan;
 - e. Sertifikat Cara BudiDaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada unit budidaya.
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi baru atau perpanjangan Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan / UMKM dalam rangka sertifikasi SKP, Surveilans penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada unit pengolahan ikan lingkup Stasiun KIPM Palu
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Palu melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi unit pembenihan dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun KIPM Palu.

- Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun KIPM Palu menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pasca panen Lingkup UPT SKIPM Palu Tahun 2025

BULAN	REALISASI			TARGET	PERSENTASE CAPAIAN
	UPI GRADE A	UPI GRADE B	UPI GRADE C		
2025	1	10	0	70	120

Sampai dengan akhir Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pasca panen yakni pelaksanaan Inspeksi Perpanjangan penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control di Unit pengolahan sebanyak 4 kali (11 Ruang lingkup) dengan metode remote inspection. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan adanya kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Berdasarkan hasil kegiatan pada 4 unit pengolahan ikan dinyatakan konsisten dalam penerapan GMP/SSOP/HACCP dan diterbitkan Sertifikat HACCP sebanyak 11 ruang lingkup. Dengan demikian pelaksanaan pada Tahun ini mencapai 100% dari target 70% sehingga secara persentase tercapai atau sama dengan nilai kinerja maksimal 120%.

Adapun bukti dukung relaisasi kegiatan “penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan” dapat diunggah pada link google drive berikut :
https://drive.google.com/drive/folders/1W5sRB1G7bwwld_chS15v4FDDiK77PgX7?usp=sharing.

DOKUMENTASI KEGIATAN TW III 2025
PELAKSANAAN INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP DAN PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA OFFICIAL CONTROL
DI STASIUN KIPM PALU

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator :

- Dokumentasi hasil inspeksi sebagai berikut :

12/7/25, 11:43 PM

Honest >Cetak>Inspeksi>Pratayang>Detail



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
OTORITAS KOMPETEN
Jl. Merdeka Timur, No. 16, Jakarta 10110, Telp. (021) 3519070(Lacak), Faks. (021) 3500140, Kotak Pos 4130, JKP 10041

LAPORAN SINGKAT HASIL INSPEKSI

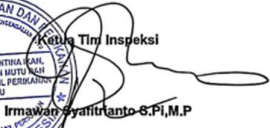
Nama UPI	PT CAKRAWALA MITRA BAHARI	Status UPI	LAMA
Alamat	Jl. Wolter Monginsidi No.28, Desa Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Central Sulawesi - Indonesia		
Jenis Produk	1. Frozen Tuna	Perpanjangan	
	2. Fresh Tuna Loin	Perpanjangan	
Tanggal Inspeksi	04 Desember 2025		
Target Perbaikan	04 Januari 2026		

A. Kondisi Umum Pelaksanaan Persyaratan Dasar
Secara keseluruhan, kondisi umum pelaksanaan persyaratan dasar sudah diimplementasikan dengan baik pada UPI. Namun demikian, masih dibutuhkan konsistensi terutaman dalam hal pencatatan (pendokumentasian) rekaman proses. Kondisi kebersihan UPI telah terjaga, namun sebaiknya petugas sanitasi melakukan pemeriksaan rutin terhadap loker karyawan juga perlengkapan sanitasi lainnya.

B. Kondisi Umum Pelaksanaan Penerapan HACCP
Bahaya telah diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, namun demikian dibutuhkan perbaikan terhadap diagram alir. Hal ini disebabkan karena Bahan baku (raw material) yang diterima oleh UPI terdiri dari dua jenis, yaitu : Produk Loin dan produk Whole (utuh), sehingga CCPnyapun berbeda berdasarkan jenis raw material tersebut.

C. Kesimpulan
Kondisi persyaratan dasar dan penerapan HACCP sudah diterapkan dengan baik. Namun, UPI idealnya terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan, sesuai dengan standar regulasi dan standar ISO 22000 yang terbaru.



Ketua Tim Inspeksi

Irmawan Syahranto S.Pi,M.P



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
OTORITAS KOMPETEN
Jl. Merdeka Timur, No. 16, Jakarta 10110, Telp. (021) 3519070 (Lacak), Faks. (021) 3500149, Kotak Pos 4130, JKP 10041

LAPORAN SINGKAT HASIL INSPEKSI

Nama UPI	PT RIVAGO SAMUDRA BERJAYA		Status UPI	BARU
Alamat	Jalan Datu Masuci No.60, Desa/Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Central Sulawesi - Indonesia			
Jenis Produk	1. Fresh Demersal Fish	Baru		
	2. Fresh Pelagic Fish	Baru		
	3. Fresh Shrimp	Baru		
	4. Fresh Tuna Loin	Baru		
Tanggal Inspeksi	16 Oktober 2025			
Target Perbaikan	16 November 2025			

A. Kondisi Umum Pelaksanaan Persyaratan Dasar

Pada prinsipnya UPI PT Rivago Samudra berjaya telah melaksanakan prinsip GMP dan SSOP dengan baik. Namun, UPI dibutuhkan beberapa perbaikan yang berhubungan dengan kesesuaian peralatan proses yang mencakup timbangan, nampan, selang air, dan metal detector.

Dokumen mutu terutama yang berhubungan dengan formulir kerja (rekaman proses) juga masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

B. Kondisi Umum Pelaksanaan Penerapan HACCP

- UPI telah mengidentifikasi bahaya dan menetapkan CCP. Namun demikian masih membutuhkan perbaikan terhadap analisa bahaya khususnya penentuan probability, severity, serta batasan bahaya.
- Sistem ketelusuran pada UPI membutuhkan perbaikan, terutama yang berhubungan dengan kejelasan informasi tentang asal-usun raw material.

C. Kesimpulan

UPI telah menerapkan panduan mutu secara konsisten. Namun demikian dokumen mutu yang sudah ada sebaiknya di review kembali dan disesuaikan dengan regulasi / acuan terbaru.


Ketua Tim Inspeksi

Irmawan Syafitrianto S.Pi.M.P.

10/20/25, 1:23 PM

Honest > Cetak > Inspeksi > Pratayang > Detail



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
OTORITAS KOMPETEN

Jl. Merdeka Timur, No. 16, Jakarta 10110. Telp. (021) 3519070(Lacak). Faks. (021) 3500149. Kotak Pos 4130. JKP 10041

LAPORAN SINGKAT HASIL INSPEKSI

Nama UPI	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA		Status UPI	LAMA
Alamat	JL. Trans Sulawesi, Desa/Kelurahan Ogotua, Kec. Dampal Utara, Kab. Toli Toli, Central Sulawesi-Indonesia			
Jenis Produk	1. Frozen Shrimp	Perpanjangan		
Tanggal Inspeksi	14 Oktober 2025			
Target Perbaikan	14 November 2025			

A. Kondisi Umum Pelaksanaan Persyaratan Dasar

UPI telah menerapkan prinsip Sanitasi dan Higienis pada proses pengolahan, lay out bangunan telah disesain untuk mencegah kontaminasi silang. Namun demikian, sebaiknya UPI secara berkala melaksanakan program resfreshment bagi karyawan agar kompetensi personil tetap terjaga.

B. Kondisi Umum Pelaksanaan Penerapan HACCP

Bahaya potensial telah ditetapkan dengan baik, demikian juga dengan pengendalian CCP. Namun demikian, UPI sebaiknya mendesain kembali program official control untuk pengujian laboratorium terhadap bahaya kimia dan biologi (Residu, antibiotik, Vibrio, Salmonella, Escherichia coli, ALT, dan lain-lain).

C. Kesimpulan

Pada prinsipnya UPI sudah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di setiap kegiatan alur proses namun diperlukan konsistensi UPI dalam penerapannya terutama di penerimaan bahan baku, pelatihan karyawan, dan program pengujian laboratorium eksternal.

Ketua Tim Inspeksi

Irmawan Syafitrianto S.Pi,M.P



Otoritas Kompeten

Jl. Merdeka Timur, No. 16, Jakarta 10110, Telp. (021) 3519070(Lacak), Faks. (021) 3500149, Kotak Pos 4130, JKP 10041

LAPORAN SINGKAT HASIL INSPEKSI

Nama UPI	PT TRITOBA SAMUDERA INDONESIA		Status UPI	LAMA	
Alamat	Jl. Wolter Monginsidi No.30, Kelurahan Nalu, Kec. Baolan, Kab.Tolitoli, Central Sulawesi - Indonesia.				
Jenis Produk	1. Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan			
Tanggal Inspeksi	21 November 2025				
Target Perbaikan	21 Desember 2025				

A. Kondisi Umum Pelaksanaan Persyaratan Dasar

Pada prinsipnya UPI PT Tritoba Samudera Indonesia telah melaksanakan prinsip GMP dan SSOP dengan baik. Namun, UPI dibutuhkan beberapa perbaikan yang berhubungan penyediaan dokumen (SOP) peralatan. Selain itu Penggunaan dan penyimpanan bahan kimia harus konsisten diimplementasikan

B. Kondisi Umum Pelaksanaan Penerapan HACCP

UPI telah mengidentifikasi bahaya dan menetapkan CCP. Namun demikian masih membutuhkan perbaikan terutama terhadap program monitoring bahaya Kimia (histamine), UPI belum menetapkan program Official control untuk pengujian Histamin.

C. Kesimpulan

UPI telah menerapkan Pengendalian Bahaya dengan Baik. Namun, agar sistem dapat berjalan efektif maka dibutuhkan komitmen dari manajemen. Dokumen mutu sebaiknya disampaikan / disosialisasikan Kepada seluruh karyawan dan dilakukan monitoring berjenjang dari manajer terhadap efektifitas sistem.

Ketua Tim Inspeksi
Kurniawan Syahrianto S.Pi,M.P.

Adapun bukti dukung relaisasi kegiatan “penerbitan sertifikat HACCP pada Unit Pengolah Ikan ” dapat dilihat pada link google drive berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/1ToERHZOqkY1kLP4wW1jZoVvwewN7BjYW?usp=sharing>

Rekomendasi rencana aksi

untuk triwulan berikutnya

Melakukan koordinasi dengan pihak UPI, Unit budidaya, pembenihan, supplier, dan unit kapal terkait Sertifikasi sebagai bagian dari upaya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Palu, 02 Januari 2026

Kepala



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA SIKOT
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALU
REPUBLIC INDONESIA

HAMZAH, S.PI,M.SI

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
 Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Palu (%)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
%Capaian	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima diunit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. - BPPMHKP Palu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan SKIPM Palu terdiri dari:
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) DiKapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara BudiDaya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Palu, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Palu, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Palu, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palu dan UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Palu
- Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) UPT Stasiun KIPM Palu di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima)

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT SKIPM TAHUN 2025

Tahun	Jumlah Sertifikasi Ekspor		Jumlah Penolakan	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan
	USA	SINGAPORE		
2025	1	185	0	100

- Adapun cara pengukurannya sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (HC Mutu)

B = Jumlah HC (Mutu) yang ditolak oleh negara tujuan

Ket :

*) = Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC karantina dan mutu dilampirkan

$$X = \frac{68 - 0}{68}$$

$$X = \frac{68}{68}$$

$$X = 1 \times 100\% = 100\%$$

Sampai dengan akhir Tahun 2025, sertifikat ekspor sertifikat ekspor mutu yang memenuhi syarat sejumlah 186 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Tahun 2025 mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase tercapai atau capaian kinerja sebesar 101% sama dengan nilai kinerja maksimal 100%.

Negara tujuan ekspor melalui Stasiun KIPM Palu Tahun 2025 antara lain Singapore dengan komoditas ikan tuna, ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Palu, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di UPT SKIPM Palu.

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025 PELAYANAN HC EKSPORT DI SKIPM PALU



DOKUMENTASI KEGIATAN TW IV 2025 INSPEKSI HACCP ONSITE

DI PT. RIVAGO SAMUDERA BERJAYA
16 OKTOBER 2025



Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator :

Inspektur mutu BPPMHKP Palu melaksanakan kegiatan Inspeksi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) pt. Rivvago Samudera Berjaya pada ruang lingkup Fresh Tuna Loin, Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Fresh Shrimp.

Kegiatan inspeksi dilakukan secara onsite. Kegiatan ini untuk melihat konsistensi pihak UPI terkait pelaksanaan GMP dan SSOP serta penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi :

BPPMHKP melalui Stasiun KIPM Palu sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jenis layanan yang diberikan salah satunya Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang dibutuhkan masyarakat pelaku usaha perikanan.

Pelayanan SMKHP dilakukan melalui Aplikasi SIAPMUTU yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan SMKHP. Layanan SMKHP sebagai bentuk jaminan mutu terhadap hasil perikanan yang di ekspor.

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya Melakukan koordinasi dengan PIHAK UPI terkait Akselerasi Sertifikasi HACCP sebagai bagian dari upaya pembinaan dan monitoring terkait sistem jaminan mutu	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab

Palu, 02 Januari 2026
Kepala



HAMZAH, S.PI,M.SI

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (MM)
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
Nama IK : Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	75	75	75		75
Realisasi	0	0	0	0	83,72	83,72	86,91	86,91	
%Capaian	0	0	0	0	111,63 %	111,63 %	115,88%	115,88%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Aspek keamanan produk perikanan adalah bagian dari keseluruhan mutu produk perikanan yang bersifat wajib. Masalah keracunan dan kontaminasi pada produk perikanan menjadi perhatian konsumen di seluruh dunia, sehingga masalah mutu dan keamanan produk perikanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan oleh otoritas kompeten, Kepala Badan selaku koordinator manajer puncak menetapkan : a. laboratorium acuan; b. laboratorium penguji; dan c. lembaga inspeksi. Laboratorium penguji merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan parameter uji yang diperlukan dan telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional. Untuk mendukung keberhasilan system jaminan mutu yang akan diselenggarakan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu memberikan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu

Laboratorium Penguji dengan rangkaian kegiatan didalamnya antara lain : Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025), Perawatan Sistem, Uji Profisiensi/ Uji Banding.

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 17025)

Untuk menilai kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 maka KAN akan melakukan asesmen, yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kecukupan (pemeriksaan dokumen mutu terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi) dan asesmen lapangan untuk melihat efektivitas implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian BPPMHKP PALU.

- Perawatan Sistem

Untuk mendukung penambahan ruang lingkup parameter uji maka perlu dilakukan perawatan sistem salah satunya dengan melakukan kalibrasi alat yang digunakan oleh laboratorium dalam melakukan pengujian. Kalibrasi alat dilakukan dengan onsite yaitu mendatangkan petugas kalibrator dari Lembaga Kalibrasi yang sudah terakreditasi dan outsite yaitu membawa beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi langsung di Laboratorium Uji BPPMHKP PALU.

- Uji Profisiensi/Uji Banding

Sebagai jaminan mutu dalam melakukan pengujian, BPPMHKP PALU mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh BUSKIPM dan uji banding dengan mengirimkan sampel ke laboratorium lain. Keikutsertaan dalam uji banding dan uji profisiensi adalah sebagai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian.

- Realisasi Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu SKIPM Palu Tahun 2025 adalah 83,72% dari target 75%, capaian kegiatan tersebut 111,63%,
- Realisasi Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palu SKIPM Palu Tahun 2025 adalah 86,91% dari target 75%, capaian kegiatan tersebut 115,88%,
 - sesuai dari Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu tanggal 07 Januari 2026

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya Melakukan koorsinasi dengan Pusat Manajemen Mutu	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
--	--

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Palu, 07 Januari 2026

Kepala



Hamzah, S.Pi, M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (MM)
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
Nama IK : Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	75	75	75		75
Realisasi	0	0	0	0	89,44	89,44	89,75	89,75	
%Capaian	0	0	0	0	119,25 %	119,25 %	119,66%	119,66%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Aspek keamanan produk perikanan adalah bagian dari keseluruhan mutu produk perikanan yang bersifat wajib. Masalah keracunan dan kontaminasi pada produk perikanan menjadi perhatian konsumen di seluruh dunia, sehingga masalah mutu dan keamanan produk perikanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan oleh otoritas kompeten, Kepala Badan selaku koordinator manajer puncak menetapkan : a. laboratorium acuan; b. laboratorium penguji; dan c. lembaga inspeksi. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan kegiatan inspeksi. Lembaga inspeksi dapat merupakan sebuah organisasi, atau bagian dari sebuah organisasi. Untuk mendukung keberhasilan sistem jaminan mutu yang akan diselenggarakan, BPPMHKP PALU memberikan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi dengan rangkaian kegiatan Asesmen <i>ISO 17020</i>.

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, pelaksanaannya di atur sebagai berikut :

- Penguatan system manajemen mutu lembaga inspeksi

Untuk menilai kompetensi Inspektur Mutu yang ada di BPPMHKP PALU Banggai berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012 maka KAN akan melakukan penilaian atas nama klien, organisasi induknya, atau dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standar, spesifikasi, skema inspeksi atau kontrak. Parameter inspeksi mencakup kuantitas, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian keselamatan pengoperasian instalasi atau sistem secara terus menerus. Melalui proses asesment dari KAN dapat memastikan jasa inspeksi dari lembaga inspeksi yang ada di BPPMHKP PALU dapat diterima oleh klien dan otoritas pengawas jasa inspeksi.

- Realisasi Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Tahun 2025 adalah 89,75% dari target 75%, capaian kegiatan tersebut 119,66%
- sesuai dari Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu tanggal 07 Januari 2026

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya Melakukan koorsinasi dengan Pusat Manajemen Mutu	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Palu, 07 Januari 2026
Kepala

Hamzah, S, Pi, M

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
Nama IK : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	83	83	0	92	92	92		92
Realisasi	0	94,62	94,62	0	96,66	96,66	96,66	96,66	
%Capaian	0	116,17	116,17	0	105,07	105,07	105,07	105,07	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
Indikator yang ditetapkan oleh kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95; c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70 Metode Pengukuran: 7 { n=1 (Nilai Indikator n X Bobot Indikator n) + Konversi Bobot - Dispensasi SPM - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.	
<u>Uraian Indikator IKPA</u>	<u>Bobot (%)</u>
1. Revisi DIPA	10
2. Deviasi RPD	15
3. Penyerapan Anggaran	20
4. Belanja Kontraktual	10
5. Penyelesaian Tagihan	10
6. Pengelolaan UP dan TUP	10
7. Capaian Output	25

8. Dispensasi SPM (pengurangan nilai IKPA)

Metode Pengukuran

7 { $n=1$ (Nilai Indikator $n \times$ Bobot Indikator n) + Konversi Bobot - Dispensasi SPM

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Uraian Indikator IKPA

Bobot (%)

1. Revisi DIPA 10
2. Deviasi RPD 15
3. Penyerapan Anggaran 20
4. Belanja Kontraktual 10
5. Penyelesaian Tagihan 10
6. Pengelolaan UP dan TUP 10
7. Capaian Output 25
8. Dispensasi SPM (pengurangan nilai IKPA)

Rincian Target

TW-1	TW-2	SMT I	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	92,00	92,00

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PALU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	84.44	95.79	100.00	100.00	98.41	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	19.16	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.22	96.55				100.00					

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil IKPA Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 96,66 atau capaian 105,07 dari

target 92.

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 07 Januari 2026

Kepala



Hamzah, S.Pi,M.Si

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Tim/ja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Catatan:

Q1,Q2,Q3,Q4	= Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I	= Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2	= Capaian Q3 + Capaian Q4
Q4	
Tahunan	= Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima) antara lain :
 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 2. Baik, apabila NKA > 80 - 90;
 3. Cukup, apabila NKA > 60 - 80;
 4. Kurang, apabila NKA > 50 - 60;
 5. Sangat Kurang, apabila NKA < 50

Variabel	Uraian	Bobot(%)	Efektivitas (75%)	1.Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10			
	2. Efisiensi SBK	15			

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO : Capaian RO

Penggunaan SBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

Rincian Target

TW-1	TW-2	SMT I	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, tahun anggaran 2025 yaitu:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.13.427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	95,00	100,00	50,00	100,00
2	032.13.427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	92,50	100,00	100,00	50,00
3	032.13.427594	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.13.427634	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.13.427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	97,23	96,30	100,00	100,00
6	032.13.440007	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45
7	032.13.567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00
8	032.13.567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.13.567461	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.13.567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00
11	032.13.567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKAPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00
12	032.13.567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00
13	032.13.567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00
14	032.13.567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.13.567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.13.645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.13.649531	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	95,00	100,00	100,00	66,65
18	032.13.649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.13.649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.13.649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.13.649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.13.649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25
23	032.13.649632	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	92,50	100,00	100,00	50,00
24	032.13.649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.13.649637	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
26	032.13.649641	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.13.649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.13.649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	92,51	96,68	50,00	100,00
29	032.13.649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	95,00	100,00	50,00	100,00
30	032.13.649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00
31	032.13.649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	100,00	100,00	100,00	100,00

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil NKA Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 100 atau capaian 139,86 dari target 71,50.

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Palu, 07 Januari 2026
Kepala

Hamzah, S.Pi,M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
Nama IK : Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	100	100	100		100
Realisasi	0	0	0	0	100	100	100	100	
%Capaian	0	0	0	0	100	100	100	100	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

- Jumlah nilai temuan BPK pd LK Unit Es I TA 2025

Jumlah realisasi Anggaran Unit Es I TA 2025 X 100%

Rincian Target

TW-1	TW-2	SMT I	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, tahun anggaran 2025 sesuai Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor:82/ITJ/R.610/X/2025 tanggal 07 oktober 2025 yaitu:

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 100 atau capaian 100% dari target 100

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 07 Januari 2026

Kepala



Hamzah, S.PI, M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu**Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu****Nama Timja : Dukungan Manajerial****Periode Laporan : Tahun 2025****Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP****Nama IK : Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (indeks)**

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	75	75	0	82	82	82		82
Realisasi	0	85.91	85.91	0	86.11	86.11	86.11	86.11	
%Capaian	0	114,54	114,54	0	105.01	105.01	105.01	105.01	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
- Adapun cara pengukurannya sebagai berikut :

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

1. Kualifikasi: Berdasarkan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

2. Kompetensi: Berdasarkan riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja: Berdasarkan penilaian prestasi kerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

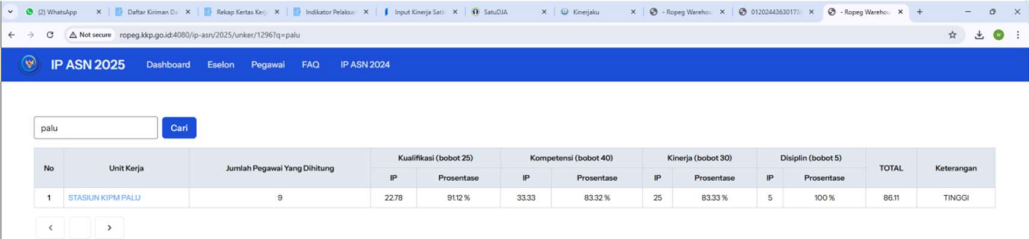
4. Disiplin: Berdasarkan riwayat penjatuhan hukuman disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil IP ASN Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 memperoleh nilai IP ASN sebesar 86.11 dari target 82. Jadi nilai kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu pada TW IV 2025 sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 105.01%

INDEKS PROFESIONALISME ASN SATKER STASIUN KIPM PALU 2025



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	STASIUN KIPM PALU	9	22.78	91.12 %	33.33	83.32 %	25	83.33 %	5	100 %	86.11	TINGGI

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 02 Januari 2026

Kepala

Hamzah, S.Pi,M.Si



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
Nama IK : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	86	86	86		86
Realisasi	0	0	0	0	87.9	87.9	87.9	87.9	
%Capaian	0	0	0	0	102.21	102.21	102.21	102.21	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.
- Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP lingkungan BPPMHKP.
- Penilaian Mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu :

<u>Kategori</u>	<u>Nilai</u>	<u>Predikat</u>
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Rincian Target

TW-1	TW-2	SMT I	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00

Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, tahun anggaran 2025 sesuai Surat BPPMHKP Nomor:1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 yaitu:

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM TJ. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	BKIPM DENPASAR	27	24	12.6	21	84.6	A
51	BKIPM JAYAPURA	20.7	20.7	12	15.5	68.9	B

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 87,9 atau capaian 102,21 dari target 86

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Palu, 07 Januari 2026

Kepala

Hamzah, S.Pi,M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata kelola pemerintahan uang efektif, Lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Nama IK : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
%Capaian	117,64	117,64	117,64	117,64	117,64	117,64	117,64	117,64	

Catatan:

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Berdasarkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I, II III dan TW4 Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan.
- Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.
- Adapun cara pengukurannya sebagai berikut :

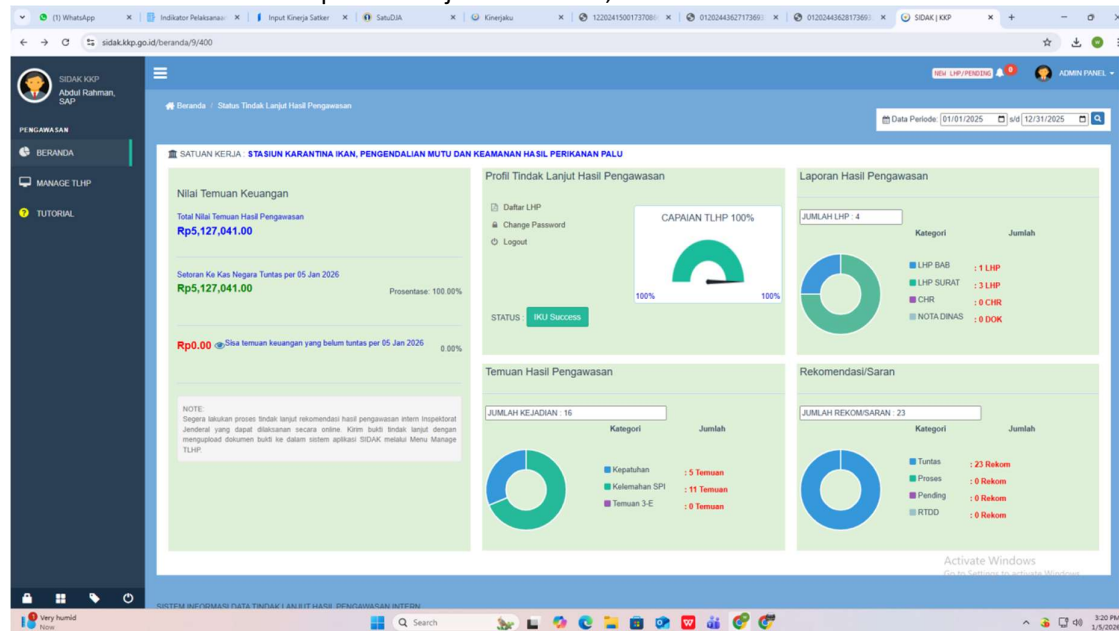
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

$$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Monitoring Aplikasi SIDAK KKP sebagai saran bagi UPT Stasiun KIPM Palu untuk selalu melihat dan menindaklanjuti segala temuan dari Inspektorat Jenderal KKP dan Audit Eksternal Lainnya yang telah koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP

Dari hasil Monitoring Aplikasi SIDAK KKP Stasiun KIPM Palu Pada 2025 bahwa temuan pengawasan sebanyak 16 dan jumlah rekomendasi 23. Dari jumlah temuan pengawasan dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya. Sehingga nilai Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palu pada Tahun 2025 sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 117,64 %



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pada Tahun 2025 secara setiap bulannya dilakukan monitoring aplikasi SIDAK KKP. Dan apabila ada temuan dari Inspektorat Jenderal KKP atau audit eksternal lainnya yang masuk dalam aplikasi SIDAK untuk segera di tindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 02 Januari 2026

Kepala

Hamzah, S.Pi,M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
Nama IK : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	76	76	76	76	76	76	76		76
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
%Capaian	131,58	131,58	131,58	131,58	131,58	131,58	131,58	131,58	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Suatu Ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP X 100%

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Rincian Target

TW-1	TW-2	SMT I	TW-3	s/d TW-3	TW-4	s/d TW-4
76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ Stasiun KIPM Palu, pada Tahun 2025 yaitu: 100%

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 100 atau capaian 131,58 dari target 76

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Palu, 07 Januari 2026

Kepala

Hamzah, S.Pi,M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
Nama IK : Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	70	70	70		70
Realisasi	0	0	0	0	71,08	71,08	71,08	71,08	
%Capaian	0	0	0	0	101,54	101,54	101,54	101,54	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
• Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari korupsi UPT SKIPM Palu • Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona integritas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Realisasi Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu, pada Tahun 2025 yaitu: 100%

NO.	UNIT KERJA	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	LINK DOKUMEN	KET
1	Balai Besar KIPM Makassar	75,31	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
2	Balai KIPM Semarang	75,28	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
3	Balai KIPM Surabaya I	77,75	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
4	Balai KIPM Denpasar	74,45	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
5	Balai KIPM Manado	75,15	Sudah pernah dikirim ke Itjen	
6	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I			TIDAK ADA IKU ZI
7	BALAI KIPM MEDAN I	75,2	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7eDpRtKmw8WnFqQaQwTaoQYMeQ8aHc/edit?usp=sharing&ouid=11862072129151013309&rtpp=drive&sd=drive	
8	BALAI KIPM BALIKPAPAN	86,18	https://drive.google.com/drive/folders/1rRP6Z7Y13c1DFchV5d144dQ18OOZUA?usp=drive_link	
9	BALAI KIPM JAYAPURA			TIDAK KIRIM LINK
10	BALAI KIPM JAKARTA II	75,14	https://drive.google.com/drive/folders/13eh84nQ41Qh7kPFjWxUV9jHkEIsx85?usp=drive_link	
11	BALAI KIPM SURABAYA II			TIDAK ADA IKU ZI
12	BALAI KIPM MATARAM		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gc6VgaTVncR-LWdnqYkhh3p5C2Auck2g8ev2x1C/edit?usp=sharing	proses penilaian
13	BALAI KIPM BANJARMASIN	76,04	https://drive.google.com/drive/folders/16NR53W5am_XPkpHEtmhDEz7UT3z3T	
14	BALAI KIPM LAMPUNG			TIDAK KIRIM LINK
15	BALAI KIPM AMBON	83,13	https://bit.ly/wkbkipmAmbon	
16	BALAI KIPM ENTIKONG	51,79	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kLvdGGt9VX_Bk9_a3p81E-mMDhK7s1a	TIDAK ADA IKU ZI
17	BALAI KIPM TANJUNG PINANG		https://drive.google.com/drive/folders/1-HQ32cyDssvCnEVXxuG1m4cc9MIUaLay?usp=drive_link	proses penilaian
18	BALAI KIPM TARAKAN			TIDAK KIRIM LINK
19	STASIUN KIPM PALEMBANG	79,81	https://drive.google.com/drive/folders/1tngnyyQGRhXUipx7FeJbe5GwWv8DD?usp=drive_link	
20	STASIUN KIPM BANDUNG	82,34	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19L7np4Gsq1g0y1LLQmxCk4QDIO2u3	TIDAK ADA IKU ZI
21	STASIUN KIPM MERAUKE	75,94	https://drive.google.com/drive/folders/10hAXb8QctE7K5pKPn1SseUroWgTX5d4	
22	STASIUN KIPM PONTIANAK	76,46	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQxul3Qn6Fm3JfMsc8uYDdg73zy0uwwtCokWZVl/edit?usp=sharing	
23	STASIUN KIPM KENDARI	75,95	https://drive.google.com/drive/folders/1k8RD1szQXgz9L_g48-1y8nkvM6k6k3C8tuzm8ad0e	
24	STASIUN KIPM BATAM	78,17	https://docs.google.com/spreadsheets/d/188131yChH5TX9gricQY3-4WBF8Gwt/edit?usp=sharing&ouid=115755447930257168810&rtpp=drive&sd=drive	
25	STASIUN KIPM PADANG	80,86	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nuk5m40Ihluq_WDilpiNngEyMiDrDCV/edit?usp=sharing&ouid=113974624934543795356&rtpp=drive&sd=drive	
26	STASIUN KIPM JAMBI	82,02	https://binvuri.com/KertasKerjaUK&kipm&jambi	
27	STASIUN KIPM PALU	71,08	https://drive.google.com/drive/folders/1hya8g89FkTCPrBxmYkaZ8-8V8nVY0s?usp=drive_link	

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Dari hasil Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palu Pada Tahun 2025 Realisasi sebesar 71,08 atau capaian 101,54 dari target 70

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 13 Januari 2026

Kepala


Hamzah, S.Pi,M.Si

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Palu

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Palu
Nama Timja : Dukungan Manajerial
Periode Laporan : Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan
Nama IKU 7	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palu (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	3.36	3.36	3.36		3.36
Realisasi	94.44	100	100	99,69	4,00	4,00	4,00	4,00	
%Capaian	107.31	113.63	113.63	110,96	119,05	119,05	119,05	119,05	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Survei Kepuasan Masyarakat yang di lakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu dilakukan secara online dan offline, petugas yang telah ditunjuk menginstruksikan kepada responden untuk berpartisipasi dalam mengisi link SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang telah disiapkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan Perikanan, adapun link yang dimaksud adalah <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/43> Komunikasi pemberitahuan link dilakukan

melalui via whatsapp, telpon serta tatap muka secara langsung

Lokasi pengumpulan data dilakukan di kantor pelayanan SKIPM Palu, Tempat Pemeriksaan Fisik (TPF) dan Laboratorium SKIPM Palu serta kediaman responden. Pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan

Waktu pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil

Hasil pengolahan data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palu pada Tahun 2025, dari setiap unsur pelayanan telah mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu 4,00. Hal ini menjadi indikator bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palu telah berjalan dengan baik, Perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mempertahankan pelayanan yang sudah baik tersebut.

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$\text{IKM} = 36 \times \frac{1}{9}$$

$$\text{IKM} = 4,00$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

$$\text{SKM} = \text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = 4,00 \times 25$$

$$\text{SKM} = 100$$

Akar Masalah	Penanggung Jawab
Masih adanya pengguna jasa yang belum paham dengan aplikasi SISUSAN sebagai saran untuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Ditambah lagi jarak yang jauh dari kantor pelayanan dan bahkan ada yang tinggal di Tolitoli.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tindakan yang dilaksanakan	Penanggung Jawab
Memberikan sosialisasi saat kegiatan surveilan dan inspeksi serta melalui media sosial (WA)	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pada Tahun 2025 secara setiap bulannya dilakukan monitoring aplikasi SUSAN KKP. Dan untuk selalu meningkatkan nilai unsur-unsur pelayanan yang menjadi fokus penilaian	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada Tahun 2025 telah dilakukan monitoring temuan pada aplikasi SUSAN KKP dengan hasil adanya peningkatan nilai SKM dibandingkan dengan nilai SKM sebelumnya dan sdh ditindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Palu, 13 Januari 2026
Kepala



Hamzah, S,Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN TW IV 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI SKIPM PALU

Stasiun KIPM Palu

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Triwulan 4

2025

Submit

50 Data terakhir Tw 4/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10

 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Bengkulu	2025	4	4.58	90.05	36
bmutu	Stasiun KIPM Mamuju	2025	4	5.00	94.14	9
bmutu	Stasiun KIPM Cirebon	2025	4	4.95	90.86	131
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	4	4.84	91.13	108
bmutu	Stasiun KIPM Palu	2025	4	5.00	100.00	22
bmutu	Stasiun KIPM Bima	2025	4	4.85	97.44	13
bmutu	Balai KIPM Denpasar	2025	4	4.94	96.49	353
bmutu	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	2025	4	4.95	97.09	41

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

GARUDA88
Internet access

Stasiun KIPM P

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Triwulan 4

2025

Submit

50 Data terakhir Tw 4/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10

 entries per page

palu

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Palu	2025	4	5.00	100.00	22

Showing 1 to 1 of 1 entries

Download Data

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Stasiun KIPM Palu

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Laporan hasil uji mutu produk perikanan

☐ Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)

☐ Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)

☐ Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

☐ Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

☐ Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

☐ Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

☐ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

☐ Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

☐ Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Data Responden

Waktu Survey

15-Oct-2025 15:25

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Link SKM

<https://drive.google.com/drive/folders/1epIP5EBgaolCYosvE7rp2ZewJAiyTJMx?usp=sharing>